

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dimasa sekarang ini, peran dan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang dari golongan manapun sangatlah dibutuhkan demi kelancaran pembangunan. Pembangunan dapat dikatakan berhasil jika keluarga sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dengan jelas disebutkan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, maupun memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Kemudian jika kita lihat kembali salah satu aspek terpenting dari keluarga adalah istri yaitu seorang wanita yang akan mendidik dan merawat anak-anak dan suaminya manun tidak juga dapat dipungkiri jika para wanita ini juga dapat membantu menunjang peningkatan taraf hidup keluarganya. Jumlah penduduk wanita yang besar juga bisa dipandang sebagai bagian dari sumber daya manusia yang merupakan salah satu bagian dari modal dasar pembangunan bangsa. Jumlah penduduk wanita yang sedemikian besar merupakan aset dan problematika di bidang ketenagakerjaan. Dengan mengelola potensi wanita melalui bidang pendidikan dan pelatihan maka tenaga kerja perempuan akan semakin menempati posisi yang lebih terhormat untuk mampu mengangkat derajat bangsa. Sejalan dengan proses pembangunan yang dilakukan,

bangsa Indonesia menempatkan kedudukan wanita sejajar dengan kaum pria sebagai sumber daya manusia bagi pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Dukungan pemerintah terhadap hal tersebut diawali dengan komitmen Indonesia untuk meningkatkan pengarusutamaan gender sejak tahun 1978, walaupun masih ditujukan bagi upaya peningkatan peranan perempuan yang lebih mengarah pada pemberdayaan perempuan di dalam keluarga. Pada tingkat Internasional, Indonesia telah menandatangani *Beijing Platform for Action* mengenai agenda kesepakatan internasional untuk memberdayakan perempuan, yang dihasilkan melalui Konferensi Dunia IV tentang perempuan pada tahun 1995. Indonesia memberikan respon pada tahun 1999 dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dituangkan dalam GBHN 1999 (Sadiawati, 2004: 2).

Seiring dengan proses pencapaian kesetaraan antara laki-laki dan perempuan melalui proses pelaksanaan program yang telah dilakukan pada seluruh bidang pembangunan, pemerintah melakukan perubahan-perubahan regulasi yang bertujuan untuk mewujudkan gender menjadi lebih nyata. Hal ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dengan salah satu agenda utama menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis. Pelaksanaan pembangunan yang terdapat program pengarusutamaan gender tersebut bukan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun

2008. Berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah mengartikan pembangunan di Indonesia yang menuntut peran serta seluruh masyarakat secara aktif untuk berkembang dan maju, tanpa pengecualian antara laki-laki dan perempuan.

Potensi kaum perempuan sebagai salah satu unsur dalam menunjang pembangunan tidak dapat ditinggalkan lagi, baik perannya secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Swasono, besar kecilnya tingkat partisipasi angkatan kerja wanita dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga. Semakin besar pendapatan keluarga akan menyebabkan keluarnya tenaga kerja wanita dari pasar kerja apabila wanita tersebut adalah sebagai pencari penghasilan tambahan bagi keluarganya (Pudjiwati, 1983:71). Hal tersebut mengindikasikan bahwa faktor ekonomi memang masih menjadi alasan mengapa seorang wanita khususnya ibu rumah tangga memutuskan untuk bekerja. Begitu pun dengan kondisi keluarga berupa berapa banyaknya yang harus ditanggung atau dinafkahi. Keputusan seorang ibu rumah tangga untuk bekerja juga dipengaruhi oleh hal tersebut (Mulyani, 2009: 91).

Pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dari peran seseorang. Dengan adanya ilmu, maka orang tersebut dapat mengembangkan kemampuannya dan dapat berperan lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Secara teoritis, pendidikan bagi wanita akan meningkatkan penawaran dan permintaan terhadap tenaga kerja mereka. Pendidikan akan memperbaiki status, kemampuan dan meningkatkan keahlian seorang wanita (Burket, 1977 dalam Susilawati 2001). Faktanya, kebanyakan wanita di kota telah menempuh jenjang pendidikan yang tinggi dan merasa sayang bila tidak menggunakan ijazahnya untuk

bekerja (Fredlina, 2009). Untuk Kota Medan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas umumnya menamatkan pendidikan setingginya pada tingkat SLTA sebesar 34,70% untuk laki-laki dan 31,86% untuk perempuan. Kemudian disusul dengan penduduk yang menamatkan pendidikan setinggi-tingginya pada tingkat SD dan SLTP dan pada tingkat Akademi atau D-III, penduduk perempuan mempunyai persentase lebih besar dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang di Tamatkan Tahun 2015

Tingkat Pendidikan Tertinggi	Laki-laki	Perempuan	Rata-rata
Belum tamat SD	18,44	18,24	18,34
SD	18,51	22,80	20,65
SLTP	20,59	20,98	20,79
SLTA	34,70	31,86	33,28
Diploma I/II/III	2,90	2,68	3,60
Perguruan Tinggi	5,47	3,44	4,45

Sumber: BPS, Sensus Penduduk 2015.

Seperti yang kita lihat dalam Tabel 1.1, penduduk laki-laki dan perempuan pada tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan SD dan SLTP terjadi hal yang berkebalikan. Pada penduduk laki-laki, SLTP menempati urutan kedua tingkat

pendidikan tertinggi yang ditamatkan sebesar 20,59% setelah SLTA sebesar 34,70%. Sedangkan pada penduduk perempuan, SLTP menempati urutan ketiga tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan sebesar 20,98% setelah SLTA sebesar 31,86% dan SD sebesar 22,80%.

Seorang wanita yang sedang berada pada masa produktif yaitu usia angkatan kerja memiliki peluang yang lebih besar untuk bekerja daripada yang berada di luar usia angkatan kerja. Keputusan ibu rumah tangga untuk bekerja salah satunya dipengaruhi oleh usia. Usia wanita yang sedang aktif atau produktif akan meningkatkan keinginan mereka untuk bekerja dan mengenal banyak hal. Dalam hal ini tidak terkecuali para ibu rumah tangga (Demartoto, 2009: 56). Perempuan dapat membantu peningkatan ekonomi keluarga sebagai tenaga kerja yang terdidik. Potensi sumber daya yang besar ini dapat dilihat pada tabel yang diambil dari data jumlah penduduk Kecamatan Medan Deli di bawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Perempuan Berdasarkan Kecamatan di Kota Medan (Dalam Jiwa)

No	Kecamatan	Jumlah
1	Medan Tuntungan	43.325
2	Medan Johor	66.805
3	Medan Amplas	62.674
4	Medan Denai	73.914
5	Medan Area	50.095
6	Medan Kota	37.670
7	Medan Selayang	53.171
8	Medan Sunggal	58.593

9	Medan Helvetia	71.273
10	Medan Tembung	69.419
11	Medan Deli	91.828
12	Medan Marelan	82.115

Sumber : BPS Kota Medan 2015

Apabila kita lihat pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk wanita di Medan Deli paling besar dibandingkan dengan penduduk di kecamatan lainnya.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Medan Deli

NO	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2011	86.137	83.876	170.013
2	2012	86.482	84.449	170.931
3	2013	86.937	85.014	171.951
4	2014	87.954	90.193	178.147
5	2015	89.632	91.828	181.460

Sumber : BPS Kota Medan dalam angka 2019

Apabila kita lihat pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk wanita di kecamatan Medan Deli mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa potensi kaum wanita sebagai salah satu unsur dalam menunjang pembangunan tidak perlu diragukan lagi keberadaannya, baik peranannya secara langsung maupun tidak langsung. Adanya potensi yang cukup besar dari penduduk wanita ini, tidaklah mengherankan apabila pemerintah mulai

memperhatikan bagaimana memberdayakan penduduk wanita yang ada. Pemerintah mengeluarkan adanya slogan pemberdayaan perempuan (*woman empowerment*) salah satu diantaranya melalui BKKBN. Dengan adanya program BKKBN yang diluncurkan pemerintah ini mempunyai tujuan bahwa upaya prioritas yang digalakkan untuk mendongkrak status keluarga pra-sejahtera menjadi keluarga sejahtera satu adalah melalui pemberdayaan wanita. Keterlibatan wanita dan pria dalam pekerjaan mempunyai motif dan tujuan yang berbeda. Bagi pria, bekerja merupakan kewajiban yang harus dijalani karena tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah. Sedangkan wanita, khususnya yang berstatus kawin menurut Fanny Fredlina (2009), menentukan untuk memasuki angkatan kerja merupakan pilihan yang sulit, karena semuanya tergantung dari keadaan sosial ekonomi masing-masing keluarga mereka.

Program lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui Program Panca Upaya yang didasarkan pada kemitrasejajaran yang harmonis, selaras, serasi, seimbang antara pria dan wanita yang dilandasi sikap dan perilaku saling peduli, saling menghargai dan saling menghormati, saling mengisi serta saling membantu sesuai dengan strategi pembangunan untuk mengejar ketinggalan dan kesenjangan antara pria dan wanita yang dapat dilakukan dengan cara Peningkatan kemampuan wanita, agar wanita sebagai warga negara dan sebagai sumber insani pembangunan dapat mengembangkan diri secara optimal dengan semakin meningkatnya kualitas pengetahuan dan ketrampilan dalam kegiatan pembangunan. Peningkatan kedudukan wanita, agar wanita tidak terbatas sebagai pemanfaat dan penikmat hasil pembangunan saja, melainkan harus mampu berperan aktif dalam pembangunan yakni sebagai penentu kebijaksanaan, perencana, pengambil keputusan dan pelaksana

pembangunan. Peningkatan peran dan kesempatan wanita dalam pembangunan agar wanita dapat memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa dengan memperhatikan kodrat, harkat dan martabatnya.

Kodratnya sebagai ibu yang menuntutnya memiliki sifat-sifat yang feminim dan berbagai karakteristik lainnya yang berbeda dengan kaum laki-laki, menjadikan perempuan tidak bebas berpartisipasi didalam semua lapangan pekerjaan. Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja meskipun untuk saat ini TPAK wanita mengalami peningkatan yang cukup besar. Seperti yang terlihat pada table berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur

Umur	Laki-laki	Perempuan
15-19	30.128	14.469
20-24	69.940	63.441
25-29	86.975	60.818
30-34	85.750	40.114
35-39	60.363	24.180
40-44	84.720	44.680
45-49	58.905	28.440
50-54	45.900	28.440
55-59	25.760	15.180
60+	23.894	12.274
Jumlah	572.335	331.996

Sumber : BPS Kota Medan dalam angka 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat pada umur 20-24 tingkat partisipasi angkatan kerja mula-mula meningkat sesuai dengan pertambahan umur kemudian 4 menurun

kembali menjelang usia pensiun atau tua. Keterlibatan wanita dan pria dalam pekerjaan mempunyai motif dan tujuan yang berbeda. Bagi pria, bekerja merupakan kewajiban yang harus dijalani karena tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah.

Sedangkan wanita, khususnya yang berstatus kawin menurut Fanny Fredlina (Mengapa Wanita Bekerja?:2009), menentukan untuk memasuki angkatan kerja merupakan pilihan yang sulit, karena semuanya tergantung dari keadaan social ekonomi masing-masing keluarga mereka.

Kehadiran wanita sebagai salah satu potensi yang besar sangatlah dibutuhkan, walaupun tingkat partisipasinya relatif rendah dalam suatu pekerjaan daripada laki laki. Karena motivasi kerja bagi wanita masih dipengaruhi oleh anggapan masyarakat bahwa lebih baik wanita melaksanakan fungsinya sebagai ibu rumah tangga. Bagi wanita keterlibatannya didalam ketenagakerjaan mempunyai arti tersendiri dalam kehidupannya yaitu sebagai individu, isteri, ibu rumah tangga dan anggota masyarakat.

Bhasin (1996:5) mengatakan bahwa dalam rumah tangga perempuan atau istri memberikan semua pelayanan untuk anak-anak, suami dan anggota- anggota keluarga lainnya sepanjang hidupnya. Bhasin juga menambahkan, bahwa perempuan tersembunyi di dalam rumah tangga dan berlutut dengan 3M , yaitu Masak (memasak), Macak (bersolek), Manak(melahirkan anak). Sering kali mereka mendapatkan julukan sebagai “kanca wingking” (teman digaris belakang, orang yang berkewajiban mengurus rumah tangga). Dijaman sekarang ini kenyataan ini menunjukkan bahwa perempuan sekarang tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga. Tuntutan sosial dan ekonomi Seorang perempuan yang telah berstatus

menikah harus mempertimbangkan banyak hal untuk masuk atau tidak dalam pasar tenaga kerja. Dengan demikian, variable-variabel yang mempengaruhi perempuan berstatus menikah untuk bekerja akan menjadi lebih kompleks daripada pria. Demi menunjang peningkatan potensi sumber daya manusia terkhusus wanita dalam pembangunan bangsa, sudah sepatutnya penelitian tentang hal tersebut harus terus dikembangkan terkhusus bagi perguruan tinggi terutama bagi Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan, sudah sepatutnya mengkaji dan meneliti secara mendalam kemudian terhadap hal tersebut.

Maka dengan ini penulis tertarik meneliti dengan judul **“Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruh Partisipasi Tenaga Kerja Wanita Di Kota Medan”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh tingkat pendidikan terhadap Variabel-variabel yang Mempengaruhi Partisipasi Tenaga Kerja Wanita di Kota Medan ?
2. Bagaimana Pengaruh Tingkat Pendapatan Suami terhadap Variabel-variabel yang Mempengaruhi Partisipasi Tenaga Kerja Wanita di Kota Medan ?
3. Bagaimana pengaruh jumlah tanggungan keluarga terhadap Variabel-variabel yang Mempengaruhi Partisipasi Tenaga Kerja Wanita di Kota Medan ?
4. Bagaimana pengaruh pendapatan/gaji wanita terhadap Variabel-variabel yang Mempengaruhi Partisipasi Tenaga Kerja Wanita di Kota Medan ?
5. Bagaimana pengaruh umur wanita terhadap Variabel-variabel yang Mempengaruhi Partisipasi Tenaga Kerja Wanita di Kota Medan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Atas dasar latar belakang dan permasalahan seperti dikemukakan diatas, maka penelitian ini dimaksudkan:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap Variabel yang Mempengaruhi Partisipasi Tenaga Kerja Wanita di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan suami terhadap Variabel yang Mempengaruhi Partisipasi Tenaga Kerja Wanita di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat jumlah tanggungan keluarga terhadap Variabel yang Mempengaruhi Partisipasi Tenaga Kerja Wanita di Kota Medan.
4. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan/gaji wanita terhadap Variabel yang Mempengaruhi Partisipasi Tenaga Kerja Wanita di Kota Medan.
5. Untuk mengetahui pengaruh umur wanita terhadap Variabel yang Mempengaruhi Partisipasi Tenaga Kerja Wanita di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan Suami, Jumlah Tanggungan Keluarga, Pendapatan wanita dan Umur terhadap Variabel-variabel yang Mempengaruhi Partisipasi Tenaga Kerja Wanita di Kota Medan. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rencana dan mengelola khususnya potensi sumber daya wanita yang dimiliki.
2. Sebagai bahan informasi dan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut.